



PERJANJIAN KINERJA

**KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2025**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. YULIANTO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA SELATAN,

Dr. YULIANTO, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR ✓
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Prinsip Keadilan	
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	80%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	85%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	80
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.1.385.990.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.8.364.394.000,-
Jumlah		Rp.9.750.384.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Palembang, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA SELATAN,



DR. YULIANTO, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H., M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WIDODO SUDARSONO, S.H.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 03 Februari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



WIDODO SUDARSONO, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	$\frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100$	100%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator IKPA	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	Jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan operasional ----- x 100 Jumlah sarana dan prasarana	85%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaan Tinggi	Hasil Penilaian SAKIP dari Kejaksaan Tinggi	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp.30.000.000,-
2.	Layanan Perkantoran	Rp.8.159.394.000,-
3.	Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat	Rp.80.000.000,-
Jumlah		Rp.8.197.394.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

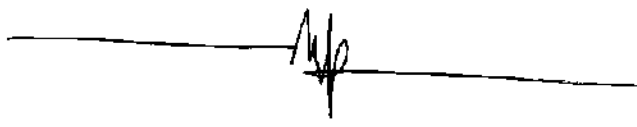
NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Pihak Kedua,
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



PRADHUMAN SIREGAR, S.H., M.H.

Talang Ubi, 03 Februari 2025
Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



WIDODO SUDARSONO, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIDO DHARMA HERMANDO, SH., MH
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

RIDO DHARMA HERMANDO, SH., MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	$\frac{\text{Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Surat perintah pengamanan pembangunan strategis}} \times 100$	75%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	$\frac{1. \text{ Jumlah penerima penerangan hukum}}{\text{Jumlah target penerima penerangan hukum}} \times 100$ $2. \text{ Jumlah penerima penyuluhan hukum}$	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penyuluhan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum	
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	80% 80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	Rp.63.580.000,-
2.	Pelayanan Publik Kepada Lembaga	Rp.9.460.000,-
3.	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Rp.40.400.000,-
	Jumlah	Rp.113.440.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN
NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



RIDO DHARMA HERMANDO, SH., MH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JULFADLI, S.H

Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H

Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

JULFADLI, S.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan}} \times 100$	90%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara yang ditangani}} \times 100$	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan}}{\text{Jumlah perkara yang ditangani}} \times 100$	90%

N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pra Penuntutan Perkara Pidum	Rp.25.180.000,-
2.	Penuntutan Perkara Pidum	Rp.306.000.000,-
3.	Eksekusi Perkara Pidum	Rp.24.440.000,-
4.	Pelaksanaan Restorative Justice	Rp.3.000.000,-
Jumlah		Rp.358.620.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

JULFADLI, S.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENGGI ELBER, SH., MH
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN
NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

ENGGI ELBER, SH., MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan ----- x 100	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan}} \times 100$	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan}} \times 100$	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)}} \times 100$	95%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	$\frac{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$	90%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	(Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	diselesaikan pada tahap pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Tahap Penyelidikan	Rp. 89.400.000
2.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Tahap Penyidikan	Rp. 200.000.000

3.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp. 241.840.000
4.	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya	Rp. 14.880.000
Jumlah		Rp. 546.120.000

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H., M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR



ENGGI ELBER, SH., MH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PATAR DANIEL PANGABEAN, SH., MH
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

Seiaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

PATAR DANIEL PANGABEAN, SH., MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	90%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan	80%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	80%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata ----- X 100 Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan	Rp.20.000.000,-
2.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp.4.800.000,-
3.	Pertimbangan Hukum	Rp.13.200.000,-
Jumlah		Rp.38.000.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

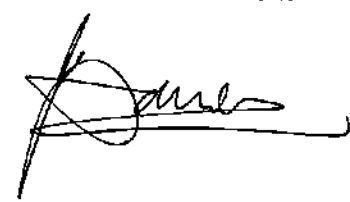
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



PATAR DANIEL PANGGABEAN, SH., MH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALFIAN JAUHARI HANIF, S.H.,M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PAPBB KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PAPBB KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

ALFIAN JAUHARI HANIF, S.H.,M.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PAPBB

KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan ----- x 100 Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani.	100%
		Persentase Penyelesaian	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pemulihan Aset Negara	berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara ----- x 100 Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	
			Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara ----- x 100 Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya ----- x 100 Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp.110.000.000,-
	Jumlah	Rp.110.000.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PAPBB KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

ALFIAN JAUHARI HANIF, S.H.,M.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGAN FERRYANO, A.Md
Jabatan : KAUR TU, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN & PNBP PADA
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIDODO SUDARSONO, S.H
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

WIDODO SUDARSONO, S.H

Pihak Pertama,

KAUR TU, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN &
PNBP

ANGGAN FERRYANO, A.Md

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAUR TU, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN & PNB
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
6. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	$\frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100$	100%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator IKPA	85%
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan operasional}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana}} \times 100$	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Indonesia			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaaan Republik Indonesia	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaaan Tinggi	Hasil Penilaian SAKIP dari Kejaksaaan Tinggi	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp.30.000.000,-
2.	Layanan Perkantoran	Rp.8.159.394.000,-
3.	Layanan Sarana Internal	Rp.175.000.000,-
Jumlah		Rp.8.364.394.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

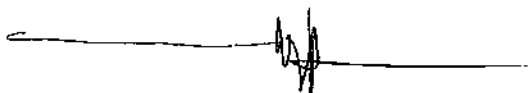
Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

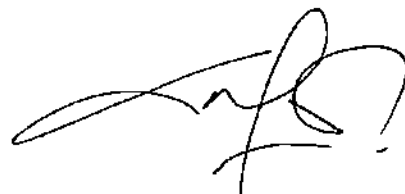
Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

KAUR TU, KEPEGAWAIAN,KEUANGAN DAN PNB



WIDODO SUDARSONO



ANGGAN FERRYANO, A.Md



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIRZA AYU DWITARI, S.H
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN EKSEKUSI DAN
EKSAMINASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JULFADLI, S.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM

JULFADLI, S.H

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN
EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FIRZA AYU DWITARI, S.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- x 100 Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan	90%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang	90%

N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penuntutan Perkara Pidum	Rp.298.870.000,-
2.	Eksekusi Perkara Pidum	Rp.46.000.000,-
3.	Pelaksanaan Restorative Justice	Rp.9.264.000,-
Jumlah		Rp.354.134.000,-

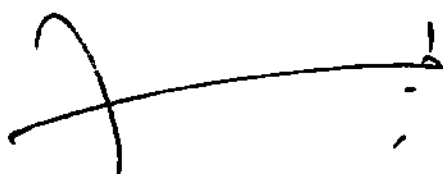
D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM



JULFADLI, S.H

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN
EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



FIRZA AYU DWITARI, S.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARYANDANA HIDAYAT, S.H
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PRA PENUNTUTAN PADA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JULFADLI, S.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

JULFADLI, S.H

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PRA PENUNTUTAN
PADA TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

HARYANDANA HIDAYAT, S.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- x 100 Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan	90%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditanganl	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan ----- x 100	90%

N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
			Jumlah perkara yang ditangani	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)}}{\text{Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)}} \times 100$	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pra Penuntutan Perkara Pidum	Rp.81.070.000,-
	Jumlah	Rp.81.070.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM



JULFADLI, S.H

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PRA PENUNTUTAN
PADA TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



HARYANDANA HIDAYAT, S.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INTAN LARASATI, S.H
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM PADA SEKSI
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PATAR DANIEL PANGGABEAN, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 08 April 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA

KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PATAR DANIEL PANGGABEAN, S.H., M.H

INTAN LARASATI, S.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	80%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	80%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	$\frac{\text{Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata}}{\text{Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata}} \times 100$	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pertimbangan Hukum	Rp.13.200.000,-
Jumlah		Rp.13.200.000,-

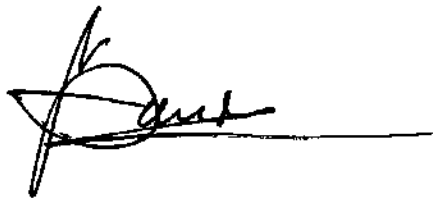
D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Talang Ubi, 08 April 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA



PATAR DANIEL PANGGABEAN, S.H., M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



INTAN LARASATI S.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARSICA LESTARI, S.H
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PATAR DANIEL PANGGABEAN, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 08 April 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA

PATAR DANIEL PANGGABEAN, S.H., M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MARSICA LESTARI, S.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	90%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan	
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	80%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	$\frac{\text{Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata}}{\text{Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata}} \times 100$	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan	Rp.30.000.000,-
2.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp.7.200.000,-
3.	Pertimbangan Hukum	Rp.13.200.000,-

2.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp.7.200.000,-
3.	Pertimbangan Hukum	Rp.13.200.000,-
Jumlah		Rp.50.400.000,-

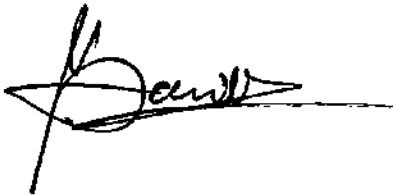
D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Talang Ubi, 08 April 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA



PATAR DANIEL PANGGABEAN, S.H., M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA
KEJAKSAAN Negeri
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



MARSICA LESTARI, S.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NARDHO RANDA, S.H
Jabatan : KAUR PERLENGKAPAN, PERPUSTAKAAN DAN DASKRIMTI
PADA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIDODO SUDARSONO, SH
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

WIDODO SUDARSONO, SH

Pihak Pertama,

KAUR PERLENGKAPAN, PERPUSTAKAAN
DAN DASKRIMTI

NARDHO RANDA, S.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAUR PERLENGKAPAN, PERPUSTAKAAN DAN DASKRIMTI
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
6. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	$\frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100$	100%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator IKPA	85%
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan operasional}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana}} \times 100$	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Republik Indonesia			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaan Tinggi	Hasil Penilaian SAKIP dari Kejaksaan Tinggi	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp.30.000.000,-
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp.2.346.000.000,-
3.	Layanan Sarana Internal	Rp. 175.000.000,-
Jumlah		Rp.2.551.000.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

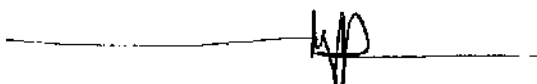
Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

Pihak Pertama,

KAUR PERLENGKAPAN, PERPUSTAKAAN
DAN DASKRIMI



WIDODO SUDARSONO, SH



NARDHO RANDA, S.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. REZHA RACHMAN, S.H
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI EKONOMI KEUANGAN DAN
PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS PADA SEKSI
INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIDO DHARMA HERMANDO, SH, MH
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN

RIDO DHARMA HERMANDO, SH, MH

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA
HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI

M. REZHA RACHMAN, S.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	$\frac{\text{Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Surat perintah pengamanan pembangunan strategis}} \times 100$	75%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	$\frac{1. \text{ Jumlah penerima penerangan hukum}}{\text{Jumlah target penerima penerangan hukum}} \times 100$ $2. \text{ Jumlah penerima penyuluhan hukum}} \times 100$	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			$\frac{\text{Jumlah target penerima penyuluhan hukum}}{\text{Jumlah target penerima penyuluhan hukum}} \times 100$	
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan LIDPAMGAL yang diterbitkan}} \times 100$	80%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan PAKEM yang diterbitkan}} \times 100$	80%

No	Kegiatan	Anggaran

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN



RIDO DHARMA HERMANDO, SH, MH

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI EKONOMI KEUANGAN
DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN
STRATEGIS



M. REZHA RACHMAN, S.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIKO ADRIAN, S.H
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN PADA SEKSI TINDAK
PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENGGI ELBER, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS**

ENGGI ELBER, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN
KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

RIKO ADRIAN, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)	95%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi ----- x 100 Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	90%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	diselesaikan pada tahap pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Tahap Penyidikan	Rp. 206.000.000
2.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Tahap Penyelidikan	Rp. 92.082.000
Jumlah		Rp. 298.082.000

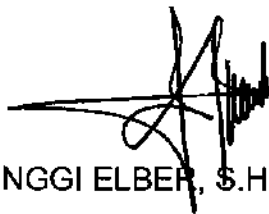
D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS



ENGGI ELBER, S.H., M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN



RIKO ADRIAN, S.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SEPTIAN SAFAAT, S.H
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENGGI ELBER, SH., MH
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS

ENGGI ELBER, SH., MH

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM
LUAR BIASA DAN EKSEKUSI KEJAKSAAN NEGERI
PANUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SEPTIAN SAFAAT, S.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)	95%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi ----- x 100 Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	90%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai,	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	diselesaikan pada tahap pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan dan Upaya Hukum	Rp. 241.840.000
2.	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya	Rp. 11.080.000
Jumlah		Rp. 252.920.000

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TIDAK PIDANA
KHUSUS



ENGGI ELBER, SH,. MH

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN UPAYA HUKUM
LUAR BIASA DAN EKSEKUSI
KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



SEPTIAN SAFAAT, S.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUDISTIRA YUSTICIA, S.H
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI IDEOLOGI, POLITIK PERTAHANAN
KEAMANAN SOSIAL BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN,
TEKNOLOGI INFORMASI PADA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIDO DHARMA HERMANDO, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN

RIDO DHARMA HERMANDO, S.H., M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI IDEOLOGI, POLITIK
PERTAHANAN KEAMANAN SOSIAL BUDAYA DAN
KEMASYARAKATAN, TEKNOLOGI INFORMASI

JUDISTIRA YUSTICIA, S.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI IDEOLOGI, POLITIK PERTAHANAN KEAMANAN SOSIAL
BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN, TEKNOLOGI INFORMASI
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu ----- x 100 Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	75%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1. Jumlah penerima penerangan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penerangan hukum 2. Jumlah penerima penyuluhan hukum	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			$\frac{\text{Jumlah target penerima penyuluhan hukum}}{\text{-----}} \times 100$	
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$ Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan	80%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$ Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	Rp.58.008.000,-
2.	Pelayanan Publik Kepada Lembaga	Rp.38.976.000,-
3.	Komunikasi Publik	Rp.52.400.000,-
	Jumlah	Rp.149.384.000,-

D. **KINERJA TAMBAHAN**

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Talang Ubi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

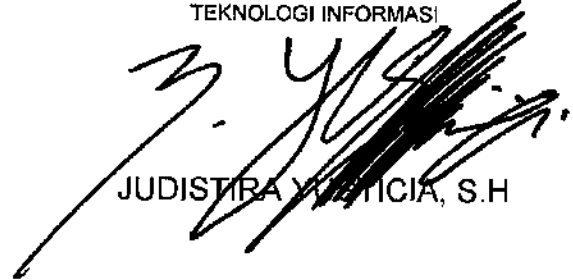
KEPALA SEKSI INTELIJEN



RIDO DHARMA HERMANDO, S.H., M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI IDEOLOGI, POLITIK PERTAHANAN
KEAMANAN SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN,
TEKNOLOGI INFORMASI



JUDISTIRA YUSTICIA, S.H